

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep pasar tidak hanya mengacu kepada institusi semata, tetapi juga mengacu kepada tempat. Sebagai institusi, pasar merupakan suatu struktur sosial yang memberikan tatanan siap pakai bagi pemecahan persoalan kebutuhan dasar kemanusiaan, khususnya kebutuhan dasar ekonomi dalam distribusi barang dan jasa. Pasar dianggap sebagai sebuah mekanisme sosial yang didalamnya sumber-sumber daya ekonomi dialokasikan dan dengan demikian pasar merupakan sebuah konstruksi sosial (Zusmelia, 2005: 3-4). Sebagai tempat, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi barang dan jasa, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dalam masyarakat pra kapitalis, tempat pasar adalah tempat fisik yang terdapat di sejumlah tempat yang ditentukan oleh masyarakat. Tetapi dalam kapitalisme modern, tempat pasar adalah “tersebar” yakni tersebar luas di berbagai tempat (Sanderson 2003:131).

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mendefinisikan pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang mendefinisikan pasar adalah tempat untuk berjual beli bagi umum dan tempat berkumpulnya para pedagang menjual dagangannya baik dengan atau tidak dengan melakukan usaha kerajinan dan pertukangan kecil.

Pasar dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori: *Pertama*, menurut pengelolanya pasar terbagi menjadi dua yaitu: Pasar Pemerintah, yaitu pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pasar Swasta, yaitu pasar yang diselenggarakan atau dikelola oleh orang pribadi atau badan. *Kedua*, dari sudut mutu pelayanan, pasar terbagi menjadi Pasar Tradisional, yaitu pasar yang dibangun dengan fasilitas sederhana, dikelola dengan manajemen sederhana dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, ataupun tenda yang diisi oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi dengan proses jual beli melalui tawar menawar dan Pasar Modern, yaitu pasar yang dibangun dan dikelola dengan menggunakan metode manajemen modern dengan mengedepankan konsep profesionalisme, didukung dengan teknologi modern serta mengutamakan kualitas pelayanan dan kenyamanan berbelanja. *Ketiga*, dari aspek bangunan, pasar terbagi menjadi Pasar Tradisional, yaitu pasar dengan kondisi bangunan yang sederhana berbentuk los, kios, toko atau tenda serta memiliki tempat parkir. Pasar Swalayan (supermarket), adalah pasar dengan bangunan semi permanen atau permanen dengan ruang yang luas dan nyaman serta biasanya menjual barang beraneka macam mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai barang elektronik. Pertokoan (shopping centre), adalah bangunan pertokoan yang berderet-deret di tepi jalan yang ditetapkan sebagai wilayah pertokoan oleh pemerintah. Shopping centre

ini berbentuk ruko yaitu perumahan dan pertokoan, sehingga dapat dijadikan tempat tinggal pemiliknya atau penyewa. Mall/Plaza/Supermall, adalah tempat berbentuk bangunan besar untuk usaha yang lebih besar yang dimiliki/disewakan baik pada perorangan, kelompok tertentu masyarakat, atau koperasi. Mall/Plaza/Supermall dilengkapi dengan sarana hiburan, rekreasi, ruang pameran, dan gedung bioskop. (www.wikipedia.com.jenis pasar. diakses 12 Februari 2016).

Di Sumatera Barat terdapat pula kategori pasar antara lain: *Pertama*, Pasar tipe A yaitu pasar yang diadakan oleh satu nagari yang dikenal sebagai pasar nagari. Pasar ini dikendalikan oleh penghulu pasar (KAN). Biasanya dia adalah orang yang berkuasa di kampung tersebut. Dia ditunjuk karena lokasi tempat berdirinya pasar adalah tanah ulayatnya. Kepala administrasi pasar adalah seseorang yang berfungsi sebagai petinggi pasar yang berada dibawah pimpinan KAN (Effendi, 1998: 3). Tipe A juga dimasukan pasar yang dibangun di tanah kaum yang tidak diserahkan pada nagari. Secara umum keduanya setingkat, pada mulanya pasar tipe A adalah pasar nagari (Van Giffen, 1990: 4). *Kedua*, Pasar tipe B yaitu pasar nagari yang merupakan gabungan dari beberapa nagari yang berlokasi pada suatu tempat tertentu atau pada salah satu nagari tersebut. Pasar ini dikepalai oleh suatu administrasi pasar atau penghulu pasar karena lokasi yang terletak pada suatu nagari yang dia pimpin. KAN tidak secara langsung memimpin pasar tetapi pasar diatur oleh komisi penasehat, KAN tidak mempunyai kekuatan secara langsung untuk mengatur pasar karena telah diatur oleh pemerintah setempat (Effendi, 1998: 4). *Ketiga*, Pasar tipe C yaitu pasar ini diklasifikasikan sama dengan pasar tradisional. Pasar ini secara langsung dikontrol

oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya dikelola langsung oleh Dinas Pasar. Pasar Tipe C ini dijalankan oleh Dinas Pasar yang bertanggung jawab pada Bupati dan Walikota. Pasar tradisional di Sumatera Barat khususnya Pasar Padang Panjang merupakan salah satu pasar tipe C.

Pasar Padang Panjang merupakan sentra ekonomi bagi penduduk Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Pasar ini terletak di pusat kota persimpangan jalan dari Padang, Bukittinggi, Batusangkar dan Solok. Pasar ini merupakan pasar yang dikelola oleh Dinas Pasar yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota dan digolongkan pasar tradisional. Pasar Padang Panjang dilihat dari segi bangunannya terdiri dari banyak los, kios yang dibuka oleh penjual maupun pihak pengelola pasar. Kebanyakan pedagang menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, berbagai jenis kue, pakaian hingga barang elektronik termasuk juga pelayanan jasa dan lain-lain. Pasar ini ramai di hari pasar yaitu hari senin dan jumat. Pada hari pasar banyak pedagang yang datang dari luar daerah untuk menjual dagangannya. Bukan pedagang saja yang datang dari luar Padang Panjang tapi pembeli juga datang dari luar daerah ini.

Pasar memang bukan suatu yang aneh bagi masyarakat kita karena banyak ditemukan berbagai permasalahan terkait dengan pasar. Persoalan yang ada di pasar ibaratnya sebuah benang kusut yang sukar untuk diurai, mengapa, darimana, bagaimana, untuk siapa dan masih banyak lagi hal yang perlu dipertanyakan. Salah satu persoalan yang terjadi di pasar yaitu konflik. Konflik di pasar dapat terjadi karena adanya revitalisasi, pengembangan, peremajaan yang dilakukan oleh

pengelola pasar atau pemerintah (Saad, 2016: 65). Konflik dapat terjadi antara berbagai stakeholder yang mempunyai kepentingan di pasar seperti penjual dan pembeli, pemilik toko dan penyewa, pengelola dan pemilik tanah dan hal yang penting lainnya adalah konflik yang terjadi antara pengelola pasar dengan pedagang. Konflik semacam itu terjadi antara stakeholder yang berkepentingan di pasar Padang Panjang yaitu Pemerintah Kota Padang Panjang, pedagang pasar Padang Panjang dan KAN nagari Gunuang mengenai peremajaan pasar Padang Panjang.

Menurut Ardi Abbas dalam tesis tentang peremajaan pasar nagari Lubuk Alung dijelaskan bagaimana peremajaan pasar sangat penting dilakukan karena membuat pasar berkembang menjadi lebih baik dan menimbulkan keuntungan serta meningkatkan pendapatan daerah. Peremajaan perlu dilakukan diantaranya untuk meningkatkan taraf hidup pedagang dan memajukan perekonomian di daerah itu, meningkatkan pemanfaatan lahan dan ruang yang ada, meningkatkan daya tampung pasar terhadap pedagang dan konsumen, menambah kegiatan pendukung, membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kondisi fisik dan estetik bangunan agar lebih berdaya tarik (Abbas, 2004: 9).

Pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun 2007/2008 merencanakan dan mengeluarkan kebijakan mengubah pasar Padang Panjang yang merupakan pasar tradisional menjadi pasar modern. Pembangunan atau peremajaan pasar dibutuhkan karena beberapa hal: (a) karena kondisi bangunan pasar yang sudah tua dan padat, (b) karena tata letak kios pedagang tidak teratur mengakibatkan tidak meratanya pedagang dikunjungi pembeli, (c) karena bencana kebakaran yang melanda pasar

berulang kali, (d) kurangnya faktor keamanan dan kenyamanan pasar dan kondisi kebersihan pasar yang tidak terjaga serta terbatasnya lahan parkir. Peremajaan pasar juga diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup pedagang dan daya tampungnya serta memajukan perekonomian wilayah. Peremajaan pasar memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Perkembangan pasar dapat menggali potensi yang ada di dalam pengelolaan keuangan sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan sehingga daerah dapat berkembang secara mandiri.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang sudah berulang-ulang dikeluarkan, jauh sebelumnya sebagaimana menurut pernyataan Syailendra yang merupakan Ketua Persatuan Pedagang Pasar Padang Panjang (P5) menyatakan bahwa rencana pembangunan/peremajaan pasar telah ada sejak 1999 masa kepemimpinan walikota yang dahulu, namun tidak ada perkembangannya sehingga baru disepakati dan dibicarakan serius tentang peremajaan pasar ini pada tahun 2006.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang bukan tanpa alasan, karena melihat kondisi pasar Padang Panjang yang sudah tidak mendukung dalam menunjang perekonomian masyarakat ditambah kondisi bangunan pasar yang sudah tua dan lahan yang sempit, kotor, semrawut, becek, lahan parkir yang sempit dan tidak memadai seperti pasar tradisional kebanyakan. Kondisi tersebut diperparah dengan terjadinya kebakaran yang melanda pasar beberapa kali membuat bangunan dan lahannya sudah tidak layak dalam melakukan proses jual

beli. Seperti yang diberitakan Pos Metro Padang pada tanggal 4 September 2011 bahwa terjadi kebakaran di Pasar Padang Panjang pukul 04.30 wib menghabiskan sekitar 123 petak di blok F dan G dan los pecah belah. Selang 10 hari tanggal 14 September 2011 kebakaran kembali terjadi dan menghabiskan sekitar 142 kios yang menimbulkan kerugian sekitar 2 M. Kondisi pasar yang memburuk dan berantakan akibat kebakaran tersebut membuat Pemerintah Kota Padang Panjang mengeluarkan kebijakan untuk melakukan peremajaan pasar Padang Panjang (lihat foto dihalaman lampiran).

Rencana Pemerintah Kota Padang Panjang meremajakan pasar ditentang oleh pedagang, pemilik los/kios dan penyewa yang ada di pasar Padang Panjang. Mereka membuat petisi keberatan terhadap rencana Pemerintah Kota tersebut. Petisi tersebut berisi tanda tangan para pedagang, pemilik los/kios, dan penyewa yang nantinya disampaikan kepada dinas pasar, mereka menamainya petisi seribu dimana terdapat seribu kumpulan tanda tangan pedagang (wawancara dengan pedagang pada tanggal 21 Januari 2016).

Selain itu pedagang juga melakukan demonstrasi dengan mendatangi gedung DPRD dan rumah dinas Walikota Padang Panjang untuk menyampaikan keluhan mereka. Pedagang mempertanyakan rencana peremajaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dengan meminta Pemerintah Kota jangan bertindak sewenang-wenang dan menghilangkan sejarah berdirinya pasar Padang Panjang. Ketua IKAPPI mengatakan jika Pemerintah Kota Padang Panjang tetap terus memaksakan pembangunan pasar, maka persoalan ini akan bermuara pada konflik

horizontal (www.kompasiana.com. satu lagi egoisme walikota padang panjang diakses 15 Februari 2016)

KAN Nagari Gunuang juga mempertanyakan peremajaan pasar oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, mereka memprotes Pemerintah Kota karena menganggap pasar Padang Panjang berdiri di tanah ulayat mereka. Sehingga Pasar Padang Panjang seharusnya dikelola oleh mereka. KAN Nagari Gunuang berpegangan dengan SK Gubernur Sumbar tahun 1984 dimana pasar Padang Panjang dulunya merupakan pasar serikat yang dimiliki oleh Padang Panjang dan nagari di sekitarnya seperti Batipuh dan X Koto dan tanahnya merupakan milik nagari Gunuang, karena itu seharusnya dikelola oleh mereka dan nagari mereka menerima deviden dari pasar Padang Panjang. (www.jayapos.com.ninik mamak merasa dilecehkan oleh walikota mengenai pembangunan pasar Padang Panjang yang sepihak diakses 15 Februari 2016).

Pemerintah Kota Padang Panjang memberi respon dengan tetap melanjutkan rencana peremajaan pasar Padang Panjang. Hal ini bertujuan untuk menjadikan Pasar Padang Panjang sebagai sentra perekonomian bagi Kota Padang Panjang karena terletak di daerah yang strategis dan mewujudkan visi dan misi dari Kota Padang Panjang dalam rangka memuluskan RPMJP 2015. Selain itu seperti yang disampaikan oleh Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis bahwa pembangunan harus dilaksanakan sebagai upaya perbaikan ekonomi masyarakat di Kota Padang Panjang (www.sumbarsatu.com diakses 21 Februari 2016).

Berkaitan dengan hal di atas menarik untuk diteliti tentang konflik kepentingan antara stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam peremajaan pasar Padang Panjang yaitu Pemerintah Kota Padang Panjang, Pedagang pasar Padang Panjang dan KAN nagari Gunuang. Penelitian ini nantinya melihat kepentingan masing-masing stakeholders sehingga menyebabkan lambatnya peremajaan pasar Padang Panjang dan bagaimana penyelesaian konflik yang dilakukan oleh stakeholders dalam konflik kepentingan yang terjadi tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan pasar tradisional memang sangat kompleks karena melibatkan berbagai stakeholder yang mempunyai kepentingan dan berharap mendapatkan keuntungan. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berkepanjangan. Proses peremajaan pasar Padang Panjang yang terkendala dan memakan waktu yang lama sejak tahun 2007 terjadi karena konflik antar stakeholder tersebut. Kondisi pasar yang memburuk dan semrawut ditambah dengan kebakaran yang terjadi berulang-ulang membuat pasar Padang Panjang terlihat memprihatinkan.

Kebijakan peremajaan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang menyebabkan pedagang pasar terbagi menjadi dua yaitu pedagang pasar yang menolak peremajaan pasar dan juga pedagang pasar yang setuju terhadap peremajaan pasar. Kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang juga ditanggapi oleh KAN Nagari Gunuang dengan menolak dan memprotes rencana peremajaan pasar tersebut karena mengklaim tanah pasar merupakan tanah ulayat kaum nagari Gunuang. Adanya perbedaan kepentingan yang timbul antara para stakeholder

menyebabkan peremajaan tidak kunjung terlaksana. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat kepentingan yang bertentangan antar Pedagang pasar, KAN nagari Gunuang, dan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam isu peremajaan pasar Padang Panjang.

Pertanyaan penelitian adalah **apa kepentingan yang bertentangan antara Pemerintah Kota Padang Panjang, Pedagang Pasar dan KAN Nagari Gunuang berkenaan dengan Peremajaan pasar Padang Panjang dan penyelesaian konflik kepentingan yang dilakukan oleh stakeholder tersebut berkenaan dengan Peremajaan pasar Padang Panjang?**

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan terjadinya konflik kepentingan antara Pemerintah Kota Padang Panjang, pedagang pasar, dan KAN Nagari Gunuang mengenai peremajaan pasar Padang Panjang.

Secara khusus tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan stakeholder dan kepentingannya dalam peremajaan pasar Padang Panjang.
2. Mendeskripsikan upaya-upaya stakeholder dalam mewujudkan kepentingan dalam peremajaan pasar Padang Panjang.
3. Mendeskripsikan penyelesaian konflik peremajaan pasar Padang Panjang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat akademis

-) Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca umumnya dan penulis khususnya dalam pengembangan konsep-konsep sosiologi dan konflik.
-) Menjadi bahan acuan bagi peneliti lain yang berminat mengenai topik ini, yang saat ini menjadi fenomena dalam peremajaan pasar.

2. Manfaat praktis

-) Menjadi bahan masukan bagi instansi yang terkait yaitu pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik peremajaan pasar.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Definisi Konflik

Dalam pandangan umum konflik merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan (Soekanto, 1990: 80). Dalam pandangan teori konflik, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya. Sedangkan keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan dan pemaksaan kekuasaan dari atas atau golongan yang berkuasa. Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis (Ritzer, 2003:30).

Konflik didefinisikan oleh ahli sosiologi diantaranya: Menurut Max Weber, konflik adalah hubungan sosial yang tindakan orang-orang dengan sengaja diarahkan

terhadap keberatan pihak lain untuk (tujuan perbuatan) mewujudkan keinginannya. Konflik adalah suatu bentuk hubungan sosial, berisikan usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mewujudkan keinginannya melawan perlawanan pihak lain. Bagi Weber, konflik tidak sama dengan tindakan kekerasan seperti berperang, perkelahian. Tindakan kekerasan adalah hal yang digunakan dalam mewujudkan keinginan konflik. Konflik yang diperbincangkan oleh Max Weber terdapat dalam korporasi, birokrasi dan kelompok status (Jhonson, 1990:196).

Menurut Karl Marx konflik merupakan pertentangan, dia menekankan pada pertentangan kepentingan antara dua kelas yaitu kelas borjuis (kelas yang memiliki modal dan lahan) dan kelas proletar (kelas pekerja/buruh) (Johnson, 1986:148-149). Sama dengan Marx, Ralf Dahrendorf mendefinisikan Konflik sebagai pertentangan kepentingan. Dahrendorf juga menekankan pada kepentingan antara dua kelas (kelas pemegang otoritas dengan kelas bukan pemegang otoritas).

Kepentingan yang bertentangan sifatnya adalah kepentingan non-materialistis yaitu kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan dan membela organisasi (kepentingan menjaga status quo). Dengan demikian konflik menjadi suatu pertentangan kepentingan yang bersifat nyata dan merupakan produksi dari struktur sosial. Perbedaan kepentingan dikarenakan struktur sosial, dan konflik hanya timbul jika kesadaran akan kerugian dalam setiap keputusan pemegang otoritas, dan harus ada kelompok perjuang (Ritzer dan Goodman, 2005:153-157).

Selanjutnya definisi konflik menurut Lewis Coser. Coser mendefinisikan konflik sebagai pertentangan kepentingan non-materialistis seperti hak-hak dan nilai-

nilai. Coser lebih bertitik berat pada konsekuensi-konsekuensi terjadinya konflik pada sebuah sistem sosial secara keseluruhan. Konflik menurutnya juga dapat memberikan keuntungan pada masyarakat luas dimana konflik tersebut terjadi. Konflik justru dapat membuka peluang integrasi antar kelompok (Poloma, 2010: 110).

Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan pertentangan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pertentangan kepentingan yang terjadi dapat berupa pertentangan kepentingan yang nyata dan tidak nyata. Pertentangan kepentingan yang nyata dapat berupa pertentangan dalam mempertahankan materi sedangkan pertentangan yang tidak nyata dapat berupa pertentangan dalam mempertahankan status seseorang dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, konflik didefinisikan sesuai dengan pandangan Ralph Dahrendorf bahwa konflik merupakan pertentangan kepentingan. Pertentangan kepentingan ini disebabkan oleh struktur otoritas. Dalam hal ini terdapat pertentangan kepentingan antar aktor/stakeholder diantaranya Pemerintah Kota Padang Panjang, pedagang pasar Padang Panjang dan KAN nagari Gunuang. Pertentangan kepentingan berkaitan dengan rencana Pemerintah Kota Padang Panjang untuk melaksanakan peremajaan pasar Padang Panjang.

1.5.2. Kepentingan

Kepentingan adalah sesuatu yang diharapkan, diperjuangkan, dan sesuatu yang dipertahankan oleh suatu orang atau kelompok dalam berkonflik. Kepentingan dipandang sebagai dasar yang memotivasi para pihak untuk berkonflik baik untuk

berhadapan satu sama lain, kepentingan tersebut dapat untuk mempersatukan dan dapat memecah belah.

Kepentingan didefinisikan menurut para ahli sosiologi diantaranya, menurut Pruitt dan Rubin kepentingan itu adalah aspirasi para pihak yang disadari. Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkannya, dimana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya. Menurut Randall Collins kepentingan adalah keinginan-keinginan yang disadari yang disebabkan hal yang bersifat individual hingga struktural. Menurut Randal Collins (dalam Ritzer, 2004:162) suatu kelompok akan berjuang untuk mewujudkan kepentingannya jika pihak lain telah menggunakan kekerasan dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka punya. Menurut Max Weber kepentingan itu adalah kehendak atau keinginan orang untuk memperjuangkan hal yang diinginkannya. Kepentingan tersebut menurut Weber terdapat dalam sebuah birokrasi (otoritas dengan yang tidak memiliki otoritas), korporasi (kelompok yang memiliki staf administratif) dan dalam kelompok status.

Menurut Karl Marx dan Ralf-Dahrendorf kepentingan adalah sesuatu yang dikejar tetapi tidak selalu disadari. Kepentingan dibagi atas dua bentuk yaitu kepentingan manifes dan kepentingan laten. Kepentingan manifest adalah kepentingan yang sifatnya disadari oleh pelaku dan kepentingan laten adalah kepentingan yang belum disadari oleh pelaku. Dahrendorf juga membagi lagi menjadi

kelompok semu yang merupakan sekumpulan orang yang menduduki posisi dengan kepentingan peran yang identik (Ritzer dan Goodman 2005:153).

1.5.3 Definisi Resolusi Konflik

Definisi resolusi konflik yang dalam Bahasa Inggris adalah conflict resolution memiliki makna yang berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Weitzman & Weitzman (dalam Morton & Coleman 2000: 197) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (solve a problem together). Lain halnya dengan Fisher et al (2001: 7) yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.

Resolusi konflik adalah usaha menghentikan konflik dengan cara-cara analitis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik berarti menyelesaikan konflik dengan memecahkan akar-akar dasar konflik sehingga situasi hubungan tidak ada lagi kekerasan, sikap pihak-pihak yang bertikai satu sama lain tidak lagi bermusuhan, dan struktur konflik telah berubah (Miall, 2002:31). Pruitt dan Rubin mendefinisikan resolusi konflik sebagai usaha untuk mengakhiri kontroversi yang terjadi setelah kemandekan dan kesadaran masing-masing aktor konflik bahwa eskalasi bukanlah tindakan yang bijaksana sehingga kemudian terjadilah transisi, sehingga muncul cara-cara konflik yang secara kreatif dapat diturunkan kembali dari tangga eskalasi (Pruitt dan Rubin, 2004: 414). Lewis Coser mendefinisikan resolusi konflik dengan menggunakan konsep *terminasi konflik* yaitu proses sosial yang mendorong ke arah

penghentian konflik (Coser, 1967:37). Dalam mencapai tujuan terminasi konflik, kedua belah pihak haruslah sama-sama memberikan kontribusi pada usaha penghentian konflik dengan cara menyetujui aturan-aturan tertentu yang disepakati bersama.

1.5.4. Perspektif Sosiologis

1.5.4.1 Pertentangan Kepentingan Antara Pihak Pemegang Kekuasaan dengan Pihak Tidak Pemegang Kekuasaan

Untuk melihat permasalahan yang ada dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori konflik, karena dinilai mampu menjelaskan mengenai konflik kepentingan antar aktor/stakeholder seperti Pemerintah Kota Padang Panjang, para pedagang maupun KAN nagari Gunuang. Konflik merupakan pertentangan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pertentangan yang terjadi dapat berupa pertentangan kepentingan yang nyata dan tidak nyata. Pertentangan kepentingan yang nyata dapat berupa pertentangan dalam mempertahankan materi, sedangkan pertentangan yang tidak nyata dapat berupa pertentangan dalam mempertahankan status seseorang dalam masyarakat.

Kepentingan yang bertentangan sifatnya adalah kepentingan non materialistis yaitu kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan (menjaga status quo) dengan demikian konflik menjadi pertentangan kepentingan yang bersifat nyata dan merupakan produksi dari struktur sosial. Pertentangan kepentingan dikarenakan struktur sosial dan konflik hanya timbul jika kesadaran akan kerugian dalam setiap

pemegang otoritas dan harus ada kelompok pejuang (Ritzer dan Goodman, 2005: 153- 157).

Menurut Ralf Dahrendorf pertentangan kepentingan muncul karena adanya pembagian otoritas yang tidak merata dan harapan dan kenyataan yang tidak sebanding, akibatnya timbul kesenjangan antara yang memiliki otoritas dengan mereka yang tidak memiliki. Ketika terjadi kesenjangan yang memuncak, maka terjadilah konflik. (Ritzer, 2003 : 30).

Pertentangan kepentingan terjadi dalam struktur organisasi, adanya perbedaan dalam tingkat dominasi didalam sebuah asosiasi telah melahirkan perjuangan kelas. Terjadi pertentangan kepentingan antara kelas pemegang kekuasaan (Otoritas) dan kelas yang tidak memegang kekuasaan. Dahrendorf membagi dua kepentingan yaitu kepentingan laten (terselubung, masih dibawah permukaan kesadaran) dengan kepentingan manifes (nyata dan disadari). Kepentingan laten tidak langsung disadari dan dimaksudkan oleh pihak yang bersangkutan. Walaupun kepentingan laten tidak dipikirkan atau barangkali digeserkan kebawah sadar orang, namun kepentingan itu tetap ada dan berpengaruh. Kepentingan laten merupakan bagian yang berpengaruh juga. Kepentingan laten merupakan bagian objektif dari situasi sosial, kepentingan manifest yaitu kepentingan yang sifatnya sudah disadari oleh pelaku yang terwujud dalam rencana – rencana dan program aksi (Dahrendorf, 1986: 18-19).

Pada penelitian ini teori konflik Dahrendorf tentang pertentangan kepentingan dapat dipakai karena antara Pemerintah Kota Padang Panjang, pedagang pasar dan lembaga KAN terjalin dalam hubungan otoritas yaitu Pemerintah Kota Padang

Panjang memiliki kekuasaan (otoritas) sedangkan pedagang dan KAN nagari Gunuang tidak memiliki kekuasaan dalam kebijakan peremajaan Pasar Padang Panjang.

1.5.4.2. Resolusi Konflik

Secara tradisional, tugas penyelesaian konflik adalah membantu pihak- pihak yang merasakan situasi yang mereka alami sebagai sebuah situasi *zero – sum* (keuntungan diri sendiri adalah kerugian pihak lain). Agar melihat konflik sebagai keadaan non- zero- sum (dimana kedua belah pihak dapat memperoleh hasil atau keduanya sama - sama tidak memperoleh hasil) dan kemudian membantu pihak- pihak yang berkonflik berpindah ke arah hasil yang positif (Miall dkk, 1999).

Cara pandang dalam penyelesaian konflik yaitu:

1. Litigasi (adversarial paradigm) yakni kecendrungan memilih pengadilan sebagai sarana menyelesaikan konflik. Pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu mahal, menguntungkan pihak-pihak tertentu, sering tidak mengubah sikap bermusuhan, hasil menang-kalah, pihak yang kalah bersikap negatif terhadap pihak yang menang, tidak menyelesaikan konflik untuk jangka panjang karena pihak yang kalah kecewa.
2. Non litigasi (non adversarial paradigm) yakni penyelesaian konflik di luar pengadilan, beberapa cara legal yang bisa ditempuh seperti negosiasi, mediasi,
3. Adanya pihak ketiga, secara paling sederhana pihak ketiga dapat didefinisikan sebagai individu atau kolektif yang berada di luar konflik antara dua pihak

atau lebih dan mencoba agar mereka untuk mencapai kesepakatan (Pruitt dan Rubin, 2004:374).

1.5.5. Studi Relevan

Studi mengenai konflik yang terjadi di pasar baik mengenai peremajaan, revitalisasi atau kepemilikan pasar sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Namun konflik mengenai peremajaan pasar di berbagai daerah pasti memiliki pola konflik dan penyelesaian yang berbeda, serta actor/stakeholder yang terlibat berbeda. Adapun penelitian tersebut adalah:

Sriyenti (2005) “Konflik Kepemilikan Pasar Antar Stakeholder”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang konflik antar nagari Sumani dan nagari Koto Sani tentang kepemilikan pasar Sumani. Dari hasil penelitiannya didapatkan bahwa factor pemicu terjadinya konflik antara dua nagari adalah ketidakjelasan status pasar Sumani antara Pasar nagari atau Pasar Serikat Nagari. Pengklaiman status pasar oleh kedua nagari yang menyatakan pasar tersebut adalah milik mereka.

Rahmi (2006) “Pedagang dan Revitalisasi Pasar” (studi kasus: Pedagang Kaki Lima Pasar Inpres III Lantai 2 Pasar Raya Timur Padang). Menjelaskan mengenai Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Inpres III Lantai 2 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang, dilakukan untuk menertibkan pedagang Pasar Inpres III. Revitalisasi Pasar yang dilaksanakan merupakan suatu bentuk dari perencanaan perbaikan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, yang ternyata tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan rencana karena banyak dari pedagang kaki lima yang tidak

mau menempati bangunan tersebut, walaupun mereka telah membeli lokasi yang ada di lantai 2 pasar Inpres III.

Studi lainnya tentang pembangunan pasar dari penelitian Feby Wulandari Yeter (2008) tentang “Konflik Antara Kesatuan Pedagang Pasar dengan Pemerintah Kota Padang terhadap Pembangunan Sentral Pasar Raya Padang di Eks Terminal Goan Hoat. Dalam skripsi tersebut membahas konflik yang terjadi antara Pemerintah Kota Padang dengan KPP (Kesatuan Pedagang Pasar) terhadap Pembangunan Sentral Pasar Raya Di Eks Terminal Goan Hoat. Pembangunan pasar modern tersebut menurut Pemko menggairahkan kembali perekonomian Kota Padang. Pembangunan pasar modern memiliki keunggulan dan faktor-faktor pendukung. Pembangunan terminal Goan Hoat menjadi pasar modern telah memicu protes oleh KPP. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan pengalihfungsian Terminal Goan Hoat bagi pedagang telah merugikan perekonomiannya. Tapi bagi pemerintah, pembangunan pasar modern memberikan dampak financial yang positif bagi pendapatan asli daerah.

Marisa Elsera (2009) yang penelitiannya berjudul “Penyebab Konflik dan Upaya Penyelesaiannya antara Pedagang Inpres II, III, dan IV dengan Pemko Padang”. Penelitian ini menemukan bahwa penolakan rehabilitasi dan rekonstruksi berawal dari pembangunan kios sementara yang diklaim oleh pedagang dilakukan secara sepihak oleh Pemko Padang. Perbedaan keinginan dan perspektif antara pedagang Inpres II, III dan IV dengan Pemko Padang yaitu Pemko berkeinginan untuk membangun ulang Pasar Raya Padang dengan membongkar bangunan yang lama dan kemudian dibangun dengan konstruksi yang baru. Sementara pedagang

berkeinginan agar Pemko cukup merehabilitasi Inpres II, III dan IV dengan alasan bahwa struktur bangunan gedung masih layak untuk direhabilitasi. Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pedagang dan Pemko untuk penyelesaian konflik ini, yaitu dengan cara menyurati Pemko bahwa pedagang menolak pembangunan Pasar Inpres dan membangun aliansi. Sementara itu Pemko Padang berusaha untuk menjalin komunikasi dengan pedagang dan menjalin aliansi dengan pedagang berbagai pihak. Banyak aktor yang terlibat dalam konflik ini diantaranya DPRD, PBHI, FWK, Ampepara, dan Komnas HAM.

Studi yang menyangkut konflik pasar lainnya seperti yang diteliti oleh Ammar (2009: 1-9) tentang “Penolakan Pedagang terhadap Kebijakan Pemerintah Nagari Membangun Ulang Pasar Nagari di Ujung Gading Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat”. Penelitian ini membahas tentang kebijakan pemerintah nagari yang ingin membangun ulang pasar nagari dengan landasan otonomi daerah dan peraturan daerah yang kemudian pemerintah nagari mengeluarkan pengumuman kepada para pedagang di pasar nagari tersebut untuk mendaftar ulang sehubungan dengan pembangunan pasar raya Ujung Gading segera dimulai.

Keluarnya pengumuman ini tidak direspon oleh para pedagang dan kedepannya para pedagang melayangkan surat kepada pejabat pemerintah nagari dan pejabat Pemerintahan Daerah Pasaman lainnya termasuk investor. Beberapa pertemuan kemudian digelar antara pemerintah daerah, pemerintah nagari, investor dan pedagang sendiri. Namun, pertemuan – pertemuan yang diadakan tersebut tidak

menghasilkan kesepakatan apapun hingga pembangunan pasar raya Ujung Gading sampai saat ini belum terealisasi.

Penelitian Ammar menekankan pembahasan kepada alasan penolakan pedagang terhadap kebijakan peremajaan pasar nagari oleh pemerintah nagari. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian saudara Ammar teori kebijakan public sebagai alasan pemerintah nagari dalam mengeluarkan kebijakan dan factor penyebab penolakan oleh pedagang.

Studi lainnya dari penelitian Yurri Trinanda (2012) tentang “Penyebab Pertentangan Kepentingan antar stakeholder sebagai Penyebab Kesemrawutan Pasar Siteba Kota Padang”. Dalam skripsi tersebut membahas adanya pertentangan kepentingan antar actor yaitu, antara pemerintah dengan PKL dan becak motor yang beraktivitas di badan jalan terutama di depan pasar Siteba. Akibatnya menimbulkan berbagai persoalan seperti kemacetan, kesemrawutan, karena memanfaatkan fasilitas umum untuk berdagang atau beraktivitas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yurri Trinanda diperoleh kesimpulan bahwa adanya kepentingan yang bertentangan antar actor yang terlibat di pasar Siteba, dari kepentingan yang berbeda ini akhirnya menimbulkan suatu pertentangan kepentingan. Pihak pemerintah mempunyai kepentingan dengan menjalankan kebijakan peraturan pemerintah karena itu merupakan tugas dan fungsinya, sedangkan para PKL dan becak motor yang berada di badan jalan juga mempunyai kepentingan yang berbeda yaitu karena adanya kepentingan ekonomi, makanya mereka bertahan untuk tetap berjualan di badan jalan. Upaya yang

dilakukan oleh pemerintah melakukan sosialisasi lisan, tulisan, mustawarah dan penertiban telah dilakukan. Para PKL dan becak motor melakukan perlawanan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini lebih memfokuskan pada pertentangan kepentingan antar stakeholder sehingga menyebabkan lambatnya rencana Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melakukan peremajaan pasar Padang Panjang.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu sebuah pendekatan yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan manusia. Pendekatan kualitatif dipilih karena metode penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh terhadap realitas sosial yang dibangun oleh manusia. Penelitian kualitatif berupaya menginterpretasikan dan menangkap apa yang terungkap dari yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti perlu mengumpulkan mengenai realitas social dari sudut pandang actor/stakeholder dengan mengumpulkan informasi mengenai label-label, stigma, atau argument yang diberikan oleh orang terhadap sesuatu. Penelitian kualitatif dapat membongkar pikiran – pikiran dan pengetahuan yang tersimpan dalam kepala-kepala subyek penelitian. Karena itu dipakailah pendekatan kualitatif karena dapat menjelaskan data secara mendalam dan bervariasi (Afrizal, 2014:30-32).

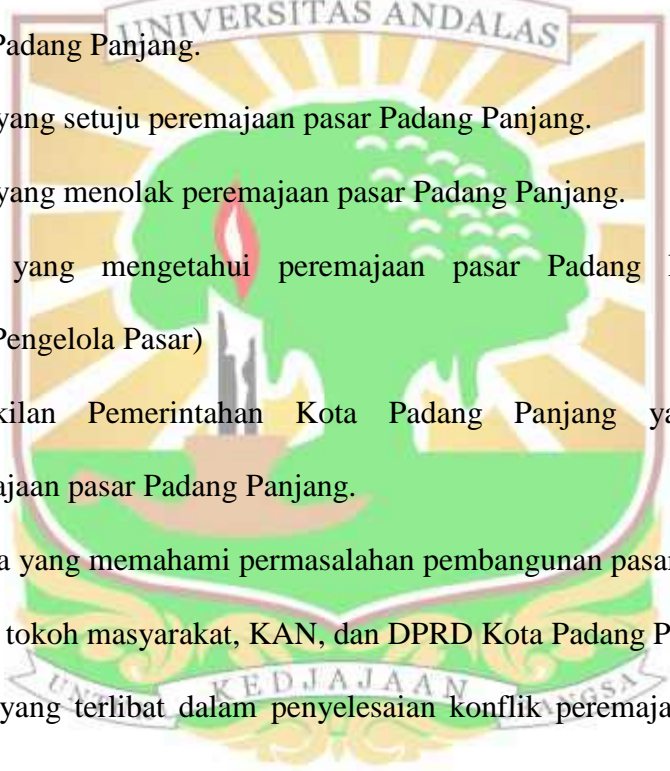
Sementara itu, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal, 2003:20). Penggunaan metode ini memberikan peluang kepada peneliti untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi guna menggambarkan subyek penelitian (Moleong, 1998:6).

1.6.2 Informan penelitian dan Teknik penentuan informan

Penelitian ini menggunakan informan sebagai subjek penelitian yaitu orang-orang yang relevan dengan kepentingan permasalahan dan tujuan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti. Mereka tidak dipahami sebagai objek, sebagai orang yang memberikan respon terhadap suatu (hal-hal yang berada di luar diri mereka), melainkan sebagai subyek. Oleh sebab itu dalam penelitian kualitatif orang yang diwawancarai tersebut juga disebut sebagai subyek penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014:139). Dalam penelitian ini, informan yang digunakan adalah orang-orang yang dipilih untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi sesuai dengan kepentingan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian. Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka dilakukan dengan teknik tertentu yang tujuannya adalah menjangkau sebanyak

mungkin informasi yang menjadi dasar penulisan laporan. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive. Purposive, artinya para peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang dijadikan sumber informasi.

Dalam penelitian ini, kriteria informan yang diambil adalah:

- 
- a. Pihak perwakilan pedagang yang mengetahui permasalahan peremajaan pasar Padang Panjang.
 - b. Pihak yang setuju peremajaan pasar Padang Panjang.
 - c. Pihak yang menolak peremajaan pasar Padang Panjang.
 - d. Pihak yang mengetahui peremajaan pasar Padang Panjang. (Dinas pasar/Pengelola Pasar)
 - e. Perwakilan Pemerintahan Kota Padang Panjang yang mengetahui peremajaan pasar Padang Panjang.
 - f. Mereka yang memahami permasalahan pembangunan pasar Padang Panjang seperti tokoh masyarakat, KAN, dan DPRD Kota Padang Panjang.
 - g. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik peremajaan pasar Padang Panjang.

Untuk mencapai validasi data dalam melakukan penelitian di lapangan yaitu membuat catatan lapangan dengan baik, melakukan wawancara yang berkualitas dan mencari informan yang kredibel. Catatan lapangan yang baik dibuat dua tahap. Tahap pertama adalah laporan ringkas, merupakan catatan yang dilakukan selama wawancara aktual dan menunjukkan versi ringkas yang sesungguhnya terjadi. Tahap

kedua adalah laporan yang diperluas, menunjukkan suatu perluasan dari catatan lapangan yang diringkas, peneliti mengingat kembali hal yang tidak tercatat secara cepat (Spradley, 1997:95). Kemudian, wawancara berkualitas dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti: 1) Jenis kelamin pewawancara, perbedaan jenis kelamin antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai dapat mempengaruhi kualitas data, terutama persoalan yang sensitif dari sudut pandang para informan. 2) Perilaku wawancara, perilaku wawancara ketika proses wawancara dapat pula mempengaruhi kualitas informasi yang diperoleh dari para informan, dan 3) Situasi wawancara, peneliti akan menyesuaikan diri dengan situasi para informan dan meminta persetujuan kepada informan lokasi wawancara dan untuk meluangkan cukup waktunya untuk diwawancarai. Peneliti juga akan mewawancarai informan yang kredibel, yaitu informan yang benar-benar mengetahui permasalahan dari kasus konflik ini. Jadi banyak hal yang mempengaruhi persoalan data yang valid seperti ketepatan teknik pengumpulan data, kesesuaian informan, cara melakukan wawancara dan observasi dan cara membuat catatan lapangan (Afrizal, 2014:168)

Dalam validasi data juga dapat menggunakan metode triangulasi data, dimana data yang dikumpulkan haruslah dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias. Triangulasi data adalah cek dan ricek data. Triangulasi tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus sampai peneliti puas dengan datanya, sampai dia yakin datanya valid (Afrizal, 2014:168).

Jumlah informan dalam penelitian ini mengacu kepada sistem pengambilan informan dalam prinsip penelitian kualitatif, dimana jumlah informan tidak

ditentukan sejak awal dimulainya penelitian, tetapi setelah penelitian ini selesai. Wawancara dihentikan ketika variasi informan yang diperkirakan tidak ada lagi di lapangan serta data-data atau informasi yang diperoleh melalui analisis yang cermat sudah menggambarkan pola dari permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1.
Identitas Informan Penelitian

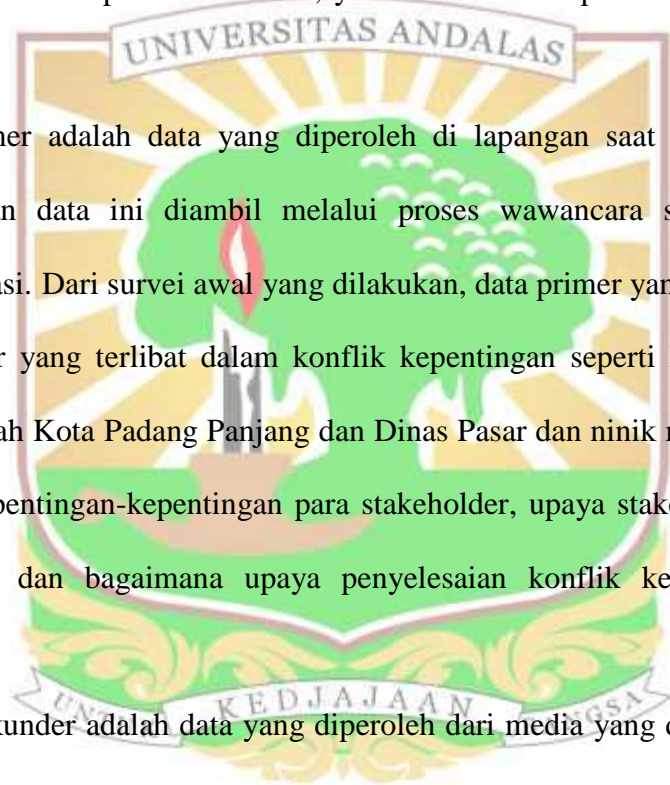
No	Kriteria	Jumlah	Alasan Dipilih
1.	Ketua Pedagang Pasar	1 orang	Ketua pedagang sebagai perwakilan pedagang mengetahui permasalahan pasar yang terjadi.
2.	Koordinator Pedagang	1 orang	Koordinator pasar yang melakukan pertemuan dengan pihak lainnya.
3.	Dinas Pasar	1 orang	Dinas pasar berperan terhadap peremajaan yang akan dilakukan
4.	Perwakilan Pemerintah Kota	1 orang	Perwakilan Pemerintah yang mengetahui peremajaan pasar pasar
5.	Pedagang yang terlibat aktif	4 orang	Permasalahan ini karena erat kaitannya dengan pedagang di pasar
6.	KAN Nagari Gunung	1 orang	Pihak KAN yang memprotes peremajaan pasar
7.	Tokoh Masyarakat	1 orang	Tokoh masyarakat mengetahui seluk beluk sejarah pasar
8.	Anggota DPRD	1 orang	Anggota dewan karena mengetahui rencana pemerintah dan keinginan pedagang

1.6.3. Data yang diambil

Sumber data adalah salah satu paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan berbeda dari yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang digunakan dalam penelitian ini. Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian sosial, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan saat proses penelitian berlangsung dan data ini diambil melalui proses wawancara secara mendalam ataupun observasi. Dari survei awal yang dilakukan, data primer yang diambil berasal dari stakeholder yang terlibat dalam konflik kepentingan seperti kepada pedagang pasar, Pemerintah Kota Padang Panjang dan Dinas Pasar dan ninik mamak dan tokoh masyarakat, kepentingan-kepentingan para stakeholder, upaya stakeholder memenuhi kepentingannya dan bagaimana upaya penyelesaian konflik kepentingan antara stakeholder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari media yang dapat mendukung dan relevan dengan penelitian ini, serta dapat diperoleh dari literatur atau studi pustaka berupa bahan tertulis, hasil penelitian, makalah, jurnal atau artikel dan studi dokumentasi yang mempunyai relevansi dengan konflik kepentingan peremajaan bangunan pasar Padang Panjang.



1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen.

a. Wawancara Mendalam.

Wawancara (interview) merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara juga berarti percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 1994:135). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara mendalam (in-depth interview) merupakan sebuah wawancara informal antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang-ulang (Taylor dalam Afrizal, 2014:136). Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara tak berstruktur, artinya pewawancara bebas menanyakan berbagai hal kepada informan dan informan menjawab pertanyaan menurut apa yang mereka inginkan (Afrizal, 2014:136). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap beberapa informan untuk bercerita apa saja yang diketahuinya tentang konflik yang terjadi baik bagaimana gambaran umum terjadinya konflik, siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana usaha yang dilakukan para pihak, apa kepentingan pihak-pihak tersebut, serta bagaimana upaya pihak lain dalam menyelesaikan konflik.

Dalam hal ini yang diwawancarai oleh peneliti adalah bagaimana proses perencanaan peremajaan pasar, pihak yang terlibat, penyebab terjadinya konflik ,

upaya pihak terlibat dalam mewujudkan kepentingan dan bagaimana upaya penyelesaian yang sudah diupayakan pihak – pihak tersebut, bagaimana intervensi pihak yang terlibat dalam pembangunan. Dalam wawancara mendalam peneliti mewawancarai para pihak yang terlibat dalam konflik yaitu pedagang pasar dan perwakilan Pemerintah Kota Padang Panjang dan dinas pasar, KAN nagari Gunuang serta anggota DPRD Kota Padang Panjang. Pada saat penelitian berlangsung peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang membantu proses wawancara seperti daftar pedoman wawancara, buku catatan, pena, *tape recorder*, dan kamera.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan para pedagang pasar, dinas pasar, tokoh masyarakat, KAN nagari Gunuang dan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dari hasil wawancara diperoleh informasi-informasi seperti kronologis kejadian konflik, stakeholder yang terlibat, kepentingan-kepentingan stakeholder tersebut dan upaya yang dilakukan stakeholder dalam penyelesaian konflik.

b. Studi Dokumen.

Peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. Pengumpulan dokumen ini mungkin dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Tanggal dan angka-angka tertentu lebih akurat dalam surat atau dokumen dari pada hasil wawancara mendalam. Bukti-bukti tertulis tentu lebih kuat dari informasi lisan untuk hal-hal tertentu, seperti janji-janji, peraturan-peraturan, realisasi sesuatu atau respon pemerintah terhadap sesuatu (Afrizal, 2014: 21).

Tabel 1.2
Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

No	Tujuan Penelitian	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Mendeskripsikan stakeholder dan kepentingannya dalam peremajaan pasar Padang Panjang.	<p>1.Primer: informan Mencari stakeholder yang terlibat dan kepentingannya berkenaan dengan peremajaan pasar.</p> <p>2.Sekunder: data tertulis di buku, literature, artikel di koran, studi dokumentasi terkait mempunyai relevansi</p>	<p>1. Wawancara</p> <p>2. Pengumpulam Dokumen</p>
2.	Mendeskripsikan upaya stakeholder mewujudkan kepentingannya dalam peremajaan pasar Padang Panjang	<p>1. Primer: informan Upaya-upaya mewujudkan kepentingan yang dilakukan stakeholder.</p> <p>2.Sekunder: data tertulis, dokumen, artikel di koran.</p>	<p>1. Wawancara</p> <p>2. Pengumpulan Dokumen</p>
3.	Mendeskripsikan penyelesaian konflik peremajaan Pasar Padang Panjang	<p>1. Primer: informan Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh stakeholder dalam mengakhiri konflik peremajaan pasar.</p> <p>2.Sekunder: data tertulis di buku dokumen, artikel di koran.</p>	<p>1. Wawancara</p> <p>2. Pengumpulan Dokumen</p>

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang digunakan dalam menganalisa data. Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga. Lembaga yang dimaksud disini adalah asosiasi pedagang pasar yang menuntut sedang lembaga lainnya adalah Pemerintah Kota Padang Panjang dinas pasar, persatuan pedagang pasar Padang Panjang dan KAN nagari Gunuang yang terlibat dalam masalah ini.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi dan tipologi. Aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data dan sampai pada tahap penulisan laporan. Menurut Moleong, analisis data adalah proses pengorganisasian data yang terdiri dari catatan lapangan, hasil rekaman, dan foto dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan, serta mengkategorikan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga mudah diinterpretasikan dan dipahami (Moleong, 1998:103).

Analisis data dilakukan mulai dari awal sampai akhir penelitian, dimana data sudah dapat dikatakan jenuh. Data yang dikumpulkan dari lapangan diklasifikasikan

secara sistematis dan dianalisis menurut kemampuan interpretasi peneliti dengan dukungan data primer dan data sekunder yang ada berdasarkan kajian teoritis yang relevan. Analisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu: peneliti melakukan perluasan catatan lapangan. Kemudian, setelah catatan lapangan diperluas peneliti melakukan koding dengan menandai bagian penting dari catatan lapangan tersebut. Kemudian, peneliti melakukan analisa dengan melihat bagaimana hubungan *point* penting yang disampaikan informan dengan pertanyaan penelitian. Peneliti juga melihat temuan-temuan dari dokumen. Setelah menganalisis dokumen dan melakukan analisis terhadap catatan lapangan kemudian peneliti mengambil kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Dari hasil analisis wawancara mendalam didukung oleh analisis dokumen, maka diperoleh tentang gambaran umum konflik, penyebab konflik, kepentingan stakeholder dan upaya yang dilakukan stakeholder dan penyelesaian konflik.

1.6.7 Proses Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membagi tiga tahap yang dilalui dari awal sampai akhir penelitian. Tahap-tahap tersebut adalah tahap pra lapangan, tahap di lapangan dan terakhir tahap pasca lapangan (analisa data).

Pada tahap pra lapangan, penulis memulai dengan pembuatan dan penyusunan rancangan penelitian atau disebut juga dengan proposal penelitian. Setelah bimbingan dengan kedua dosen pembimbing maka pada bulan April 2016, proposal tersebut diseminarkan. Setelah lulus ujian proposal, penulis mengurus surat-surat penelitian untuk turun ke lapangan mulai dari Fakultas ISIP Unand, KPPT Kota Padang

Panjang, Kesbangpol Kota Padang Panjang dan pihak-pihak terkait lainnya. Sebelum turun lapangan, terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan penelitian dan menyusun daftar data yang dibutuhkan serta cara pengambilannya, dari daftar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa ada data yang diperoleh dari kantor dinas pasar Padang Panjang, pedagang, KAN nagari Gunuang dan DPRD Kota Padang Panjang. Setelah itu peneliti mulai melakukan penelitian sesuai dengan rencana metode penelitian. Penelitian dimulai semenjak Juni 2016 sampai Agustus 2016 sambil menyusun laporan penelitian.

Pengambilan data sekunder dimulai pada tanggal Juni 2016, adapun kegiatan yang dilakukan adalah pengambilan data ke Kantor dinas pasar Kota Padang Panjang adalah berupa denah lokasi pasar dan jumlah pedagang. Setelah itu peneliti pun terus menggali informasi dari berbagai pihak mengenai siapa-siapa yang mengetahui secara jelas sejarah maupun alur konflik. Setelah mendapatkan beberapa nama informan, lalu dari informan tersebut digali lagi mengenai informan selanjutnya.

Wawancara dimulai dengan perkenalan diri kepada informan dan menjalin keakraban sehingga percakapan lebih santai dan tidak kaku. Lama wawancara berkisar 45 menit sampai 1 jam dalam satu kali pertemuan. Dalam sehari peneliti melakukan wawancara dengan satu dan dua orang informan. Hal ini disebabkan karena jarak dan waktu informan.

Wawancara dengan pedagang pasar Padang Panjang ditemui di pasar sedangkan wawancara dengan pihak KAN yaitu kepala KAN di rumah informan dan DPRD Kota Padang Panjang dilakukan di kantor tempat informan beraktifitas. Dalam

pemilihan informan peneliti lakukan berdasarkan kebutuhan penelitian dan kejenuhan data.

Selama penelitian peneliti selalu menjaga dan membentengi diri agar tetap netral dan tidak menimbulkan keberpihakan kepada salah satu pihak yang berkonflik. Karena peneliti menyadari tujuan penelitian ini bukanlah untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Peneliti hanya menjangkit data sebanyak-banyaknya untuk dapat menjawab tujuan penelitian ini. Peneliti juga mengalami kendala karena terdapat beberapa informan yang tidak mau berbicara banyak dan tidak mau berfoto untuk dokumentasi.

Tahap terakhir adalah tahap pasca lapangan. Tahap ini merupakan tahap yang rumit dan memakan waktu paling lama. Disini penulis mengklasifikasikan atau mengelompokkan data-data yang dapat di lapangan. Setelah dikelompokkan, penulis membuat suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Kemudian hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah yang melalui perbaikan-perbaikan dan arahan dari dosen pembimbing dan dosen penguji, yang akhirnya menjadi sebuah skripsi.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pasar Padang Panjang, hal ini dikarenakan pertentangan kepentingan yang terjadi antara para pedagang pasar Padang Panjang, Pemerintah Kota Padang Panjang dan KAN nagari Gunuang terjadi karena berkenaan dengan peremajaan pasar Padang Panjang. Pedagang pasar dan KAN nagari Gunuang menolak peremajaan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

1.6.9 Definisi Operasional Konsep

-) **Konflik** adalah pertentangan kepentingan antara individu, kelompok atau antara dua pihak yang bersengketa mengenai suatu.
-) **Pertentangan Kepentingan** adalah keinginan dan keperluan yang berbeda antar stakeholder. Pertentangan terjadi akibat adanya distribusi otoritas atau kekuasaan.
-) **Pedagang Pasar** adalah orang-orang yang berjualan di Pasar Padang Panjang.
-) **Pemko Padang Panjang** adalah pihak berwenang yang dilegitimasi secara hukum dan diberi kewenangan untuk mengelola Kota Padang Panjang serta memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan dalam pengembangan dan pembangunan pasar kedepannya.
-) **Peremajaan** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta infrastruktur yang ada di dalamnya.
-) **Dinas Pasar** adalah instansi/ lembaga pemerintahan yang berwenang dalam mengatur dan mengurus pasar Padang Panjang.
-) **Stakeholder Pasar** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pembangunan pasar Padang Panjang.
-) **KAN Nagari Gunuang** adalah lembaga adat yang mempunyai kepentingan di pasar Padang Panjang.
-) **DPRD Kota Padang Panjang** adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di Kota Padang Panjang.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu setelah ujian seminar proposal terlaksana pada bulan April 2016. Pada bulan Mei 2016 dilakukan perbaikan proposal. Pada bulan Juni 2016 sampai bulan Agustus 2016 dilakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian, pada bulan September 2016 data yang telah didapat mulai dianalisis. Setelah melakukan penulisan, bimbingan skripsi dan proses perbaikan, akhirnya pada bulan Desember terlaksana ujian skripsi, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel 1.3
Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2016						
		Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Mengurus Surat Izin Penelitian							
2.	Membuat Pedoman Wawancara							
3.	Penelitian Lapangan							
	<ul style="list-style-type: none"> - Mengunjungi Informan - Wawancara Mendalam - Studi Dokumen 							
4.	Analisis Data							
	<ul style="list-style-type: none"> - Kodifikasi Data - Penyajian Data 							
5.	Penulisan Skripsi							
5.	Bimbingan Skripsi							
6.	Ujian Skripsi							